

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID – 19
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna Mencapai
Gelar Sarjan Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)*



Oleh:

**REZA REFALDI KASTELA
NIM. 2016 – 10 – 141**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
2021**

HALAM PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID – 19 DI KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

Identitas Penulis,

NAMA : REZA REFALDI KASTELA

NIM : 201610141

PROGARMAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

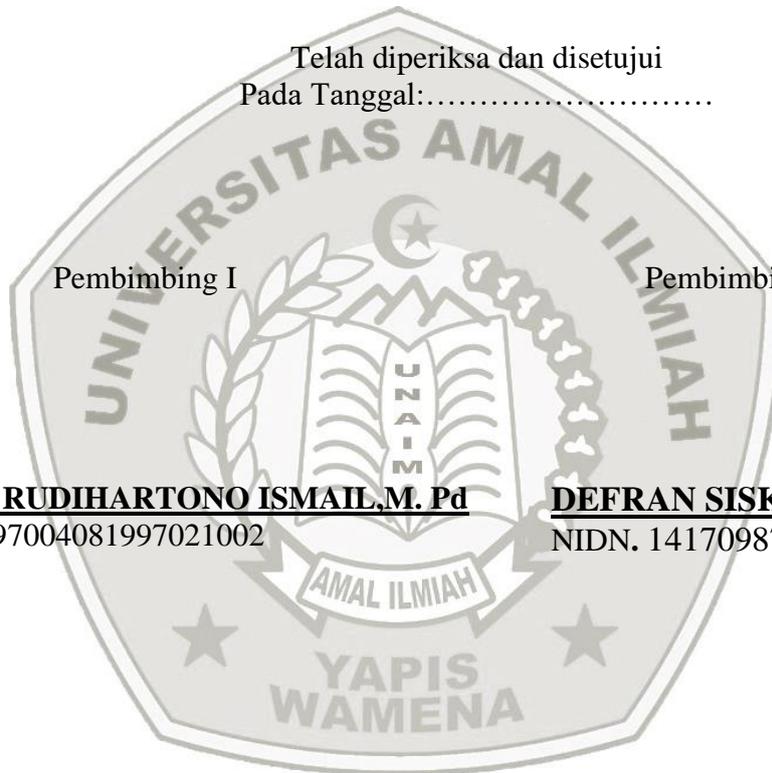
Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal:.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL, M. Pd
NIP. 197004081997021002

DEFRAN SISKA. SE., MM
NIDN. 1417098702



Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

SAHRAIL ROBO, S.Sos., M.IP
NIDN. 1425108601

HALAM PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID – 19
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Hari Sabtu Tanggal 25 September 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Rudihartono Issmail. M.Pd
NIDN.19700408 199702 1 002

Defran Siska. SE. M.M
NIDN.1417098702

Anggota,

Anggota,

Hasriani M. M.Pd
NIDN.1409128201

Tiomy B Adi. SE. M.Si
NIDN.1411057501

Mengetahui,

Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd

NIP.19700408 199702 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkn Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, petunjuk, perlindungan serta perrtolongannya sehingga penulis dapat Menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rudihartono, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasihat dan bimbingan untuk kesuksesan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Defran Siska.SE.,MM selaku Pembimbing II dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan kontribusi berupa bimbingan dan kemudahan dalam membimbing.
3. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekaligus sebagai Orang Tua Wali yang telah membimbing dan memberikan banyak kontribusi selama ini.
4. Bapak Sahrail Robo, S.Sos., M.IP selaku Ketu Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena secara khusus kepada Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan pengajaran selama masa perkuliahan.
6. Orang tuaku tercinta Ayahanda Johanis Markus Kastela dan Ibunda Irene Merce Silooy,SH yang telah membesarkan penulis, serta adik – adikku Laundry Otniel Kastela dan Patrik Kliver Kastela yang telah memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

7. Yang Terkasih Glorivy Regita Sasqia Latuihamallo yang telah sabar menanti dan memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada Seluruh Informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengambilan data.
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena selaku kawan perjuangan untuk mendapatkan gelar Sarjana.
10. Seluruh Rekan – rekan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (BEM dan LLM) Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. yang telah bersedia menjadi tempat dan teman diskusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap hasil penelitian ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan pada perkembangan Ilmu Pemerintahan di Universitas Amal Ilmiah Yapis, Wamena pada khususnya.

Wamena, 2021

Penulis

Reza Refaldi Kastela

NIM. 201610141

Abstrak

Reza Refaldi Kastela Nim: 201610141 _____ “Implimentasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya. (Dosen pembimbing: **H. Rudihartono Ismail Dan Defransiska**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implimentasi kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran wabah covid-19 di kabupaten jayawijaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna menjelaskan fokus permasalahan dan tujuan penelitian,, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan enam inidikator yakni:

- 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pebcegahan Penyebaran Wabah Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sudah sesuai dengan tujuan yaitu sasaran implementasi kebijakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.
- 2) Sumber daya dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga medis yang dimiliki oleh Pemda Kabupaen Jaywijaya masih kurang sehingga Pemda masih kewelahan dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian sarana, prasarana, dan yang mencangkup kebutuhan lapangan, sudah cukup membantu dalam pencegahan penyebaran Wabah Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya.
- 3) Hubungan Antar Organisasi dalam proses implementasi kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya menjalankan hubungan dengan TNI, Polri, Tokoh-tokoh Masyarakat, Paguyuban-paguyuban, dan tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana dalam Karakteristik dan kapabilitas yang dijalani oleh setiap agen pelaksana dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya sudah berjalan secara struktural dan sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki.
- 5) Disposisi Implementor sangat berpengaruh dalam sebuah Pemerintahan Daerah, untuk menyikapi dan mengambil keputusan tentang suatu permasalahan yang terjadi di daerah dalam bentuk lisan maupun tulisan. .
- 6) Dari factor lingkungan tentunya kesadaran dari masyarakat sangat berpengaruh untuk memutuskan rantai penyebaran covid 19, akan tetapi dalam konteks politik kita dapat menilai bahwa dalam proses implementasi

kebijakan terdapat banyak dukungan – dukungan moril yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Paguyuban-paguyuban untuk membantu jalannya implementasi kebijakan. Kemudian terkait faktor ekonomi, masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang menjadi dampak dari kebijakan ini tentu sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah memperhambat perekonomian masyarakat.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	-
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Impelementasi Kebijakan Pemerintah	9
a. Defenisi Implementasi	9
b. Defenisi Implementasi Kebijakan.....	9
2. Tahap Dalam Implementasi Kebijakan	12
3. Model Implementasi Kebijakan	12
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	31
5. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik	44
6. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik	44
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Defenisi Operasional	46
a. Implementasi Kebijakan	46
b. Standart dan Sasaran Kebujakan	46
c. Sumberdaya.....	46

d. Hubungan Antar Organisasi	46
e. Karakteristik Agen Pelaksana.....	47
f. Disposisi Implementor	47
g. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi	47
D. Alur Pikir Penelitian	47
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN.....	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
1. Lokasi Penelitian.....	50
2. Waktu Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Sampel Sumber Data	51
D. Instrument Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Observasi.....	53
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi	53
4. Kepustakaan	53
F. Teknik Analisa Data.....	54
1. Reduksi Data	54
2. Penyajian data	55
3. Penarikan Kesimpulan	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	57
a. Letak Wilayah	59
b. Luas Wilayah	60
2. Deskripsi Objek Penelitian	60
BAB V. PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran – Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN – LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	<i>Halaman</i>
1.1	Matriks Penelitian Terdahulu.....	35
4.1	Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kenlamin ...	49
4.2	Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan	49
4.3	Keadaan Informan Berdasarkan Usia	50
4.4	Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	12
2.2	Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	38
2.3	Dokumentasi Wawancara dengan Sekda Kab. Jayawijaya	51
2.4	Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Suku Maluku Tengah Kab.Jayawijaya	59
2.5	Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kab.Jayawijaya	59
2.6	Dokumentasi Wawancara dengan Pasien Karantina I	70
2.7	Dokumentasi Wawancara dengan Pasien Karantina II	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Pemerintahan Daerah selalu diwarnai oleh pelaksanaan kegiatan kegiatan dan evaluasi kegiatan, dikarenakan tugas dan wewenang pemerintah dalam sector pelayanan publik. Setiap kegiatan dalam organisasi Pemerintahan tersebut selalu dilakukan karena adanya kebijakan. Dengan kata lain kebijakan melahirkan kegiatan kegiatan tersebut. Masalah yang menimbulkan dibentuknya kebijakan oleh pemerintah adalah masalah yang dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat secara luas bukan masalah pribadi atau masalah kelompok. Masalah – masalah masyarakat yang luas dan dianggap penting oleh organisasi pemerintahan merupakan masukan - masukan yang baik dan berguna dalam proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan tidaklah mudah tapi memerlukan rasa tanggung jawab yang besar dan kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko.

Peninjauan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu kelompok organisasi pemerintahan atau swasta yang didasari oleh permasalahan – permasalahan yang ada di suatu daerah, dapat diukur berdasarkan suatu proses implementasi kebijakan. Dalam meninjau suatu kebijakan dapat dilihat apabila kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan standar dan hasil yang telah dicapai.

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kepemimpinan untuk tercapainya suatu tujuan. Kebijakan merupakan masalah pilihan yang dimuat dalam ketetapan dan prinsip - prinsip untuk mengatur tindakan secara terencana. Dalam menerapkan suatu

kebijakan tentu akan mengundang konsekuensi – konsekuensi yang tak terduga.

Implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan –tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut menyangkut usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Masalah yang diambil sebagai standar dalam menerapkan suatu kebijakan adalah masalah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan masalah pribadi/individu ataupun kelompok – kelompok tertentu. Pemerintah Daerah selaku agen pelaksana dalam penerapan kebijakan tentu harus responsif terhadap permasalahan – permasalahan signifikan yang sedang terjadi saat ini.

Seperti langkah – langkah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait kesehatan masyarakat, Penyakit Koronavirus 2019 (*coronavirus disease 2019*), atau disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini menyebabkan pandemi koronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020.

Wabah Covid-19 merupakan salah satu virus yang sangat mematikan di dunia, tentu hal ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk dihindari oleh seluruh masyarakat.

Adapun upaya – upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panic. Informasi dan teori konspirasi telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden – insiden xenophobia yang secara langsung mempengaruhi psikis masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI mulai mengambil langkah – langkah untuk mencegah penyebaran wabah koronavirus yang tertera dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 202, Pasal 1 Ayat 1 : untuk melaksanakan kebijakan dan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Lockdown merupakan peraturan perundang – undangan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang membahas kekejarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Resiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut,

orang barang, dan/lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Adapun peraturan – peraturan lain yang ditetapkan untuk penanganan koronavirus seperti :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MANKES/413/2020, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19).
3. Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/KB/2020 dan Nomor : KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang, panduan teknis pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang, Peningkatan Disiplin dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 719/P/2020 tentang, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Khususnya di Indonesia Pasien Positif Terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 177,571 Orang , sementara pasien yang meninggal tercatat mencapai 7,505 orang dan 128,057 orang lainnya dinyatakan sembuh. Presiden Republik Indonesia resmi menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional tertanggal 13 April 2020, Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayawijaya mengupdate informasi terkait Covid-19 pada tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIT, Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya diantaranya Orang Dalam Pemantauan (ODP) 2 Orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 8 Orang, Pasien Positif COVID-19 4 Orang, dan Pasien Yang dinyatakan sembuh berjumlah 59 orang. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyebar luas ke masyarakat yang lain, dikarenakan fasilitas Rumah Sakit yang belum memadai dan inisiatif masyarakat untuk menjalankan Social Distancing belum begitu berjalan dengan semestinya. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan budaya masyarakat setempat, bersentuhan, salam, berpegangan tangan dan berpelukan adalah budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat dan ditambah lagi dengan kondisi Ekonomi masyarakat yang ingin bertahan hidup dalam menghadapi Wabah Covid-19. Kebijakan yang berubah – ubah dalam proses implementasi tentu hal ini dapat menimbulkan perspektif positif dan negatif dari masyarakat, seperti masyarakat yang pro terhadap kebijakan

– kebijakan pemerintah daerah dikarenakan hal tersebut dapat meminimalisir permasalahan yang ada. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah daerah tentu mempunyai perspektif yang kusus diantaranya, kecurigaan terhadap pemerintah daerah, masyarakat dirugikan dalam sektor ekonomi, sehingga timbulah perspektif negatif dari masyarakat. Perspektif dua arah yang sesuai adalah masalah yang perlu diselselaikan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, agar semua masyarakat setuju dan kebijakan – kebijakan yang diimplementasikan berhasil di mata masyarakat setempat. Sehingga butuh peranan yang sangat penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk mengambil kebijakan – kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 tentu bukanlah hal yang mudah, butuh keberanian dan resiko yang tinggi untuk mengambil suatu kebijakan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang agar dapat hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis, dan masyarakat berhak menerima fasilitas umum yang berkaitan dengan kesehatan. Berjalan atau tidaknya suatu kebijakan atau program yang akan diimplementasikan dimulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi dan didukung oleh masyarakat itu sendiri dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai peranan penting sebagai gugus tugas dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan indikator sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menangani COVID - 19 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian ini terkait dengan Pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Implementasi Kebijakan dari Pemerintah Daerah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah sangatlah berguna untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan suatu kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan

sekelompok masyarakat yang turut serta bersama – sama dalam melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang tinjauan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya
 2. Untuk mengetahui pencegahan – pencegahan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19
2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan untuk kedepannya dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut implementasi kebijakan
2. Kegunaan secara Praktis, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya dalam melakukan usaha – usaha guna meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan dalam merumuskan suatu kebijakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan, apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksana atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka implementasi itu tidak akan banyak berarti. Berikut ini disampaikan beberapa pengertian implementasi menurut para ahli:

Menurut Eugene Bardach (1991:3) dalam Agustino (2006:138) mendefinisikan implementasi adalah “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Pernyataan lain disampaikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur implementasinya.”

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

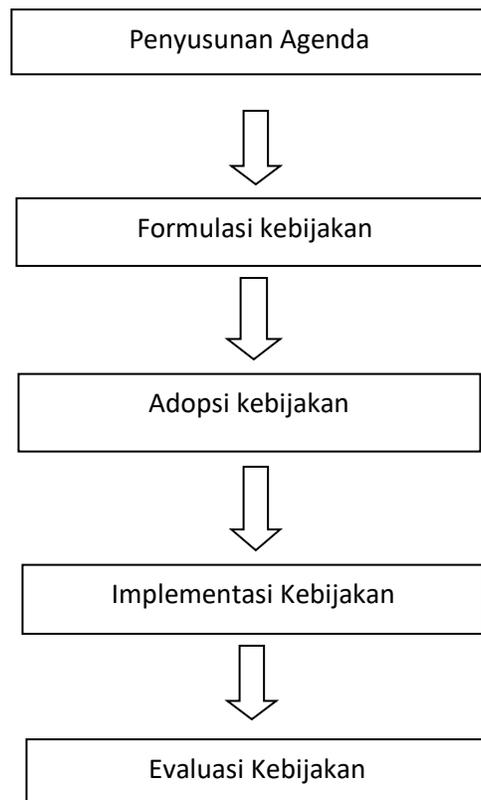
- a. Adanya tujuan atau sasaran
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Lester dan Steward Jr. (2000:104) dalam Agustino (2006:139) dimana mereka katakan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) dalam Agustino (2006:139) yaitu “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan tersebut tercapai”.

Perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan,

karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas lagi oleh Chief J.O. Udoji (1981) dalam Agustino (2006:140) dengan mengatakan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan” .

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa para ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahapan penelitian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan dibawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999:24) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana,

namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978:1985) dalam Wahab (1997:71) mengembangkan model implementasi yang disebut sebagai “The top down approach”. Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka akan diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yakni : (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin diantaranya bersifat fisik. Adapula kemungkinan hambatan tersebut bersifat politis, dalam artian bahwa baik kebijakan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima/tidak disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait. Kendala-kendala semacam itu cukup jelas dan mendasari sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para administrator guna mengatasinya. Dalam hubungan ini yang mungkin dapat dilakukan para administrator ialah mengingatkan bahwa kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-

matang sewaktu merumuskan kebijakan. (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama, dalam pengertiannya bahwa sering kali muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan yang biasa dikemukakan ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua, dalam artian bahwa disatu pihak harus dijamin bahwa tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlakukan dan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan. (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kebijakan kadang kala tidak bisa di implementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri tidak tepat penempatannya. (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Dalam hubungan ini, Pressman dan Widavski memperingatkan, bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menurut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan

pelaksana tunggal untuk keberhasilan misi yang diembannya. Tidak perlu tergantung pada badan-badan lain walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan/Instansi-instansi lainnya. (7) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk melakukan perincian dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. (8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat didalam program. (9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Persyaratan ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi loyalitas penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dari siapapun dalam sistem administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka sesegera mungkin untuk dapat diidentifikasi oleh kecanggihan sistem informasinya.

Dalam menganalisa implementasi kebijakan pemerintah daerah, penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh van Meter dan van Horn.

Teori atau model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 158) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan proses implementasi kebijakan, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Hubungan antar Organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Disposisi implementor
- 6) Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 digunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1). Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2). Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

Menurut George Edward III dalam Winarno (2008 : 182) mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2008 ; 159), mengatakan bahwa sumberdaya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dengan

demikian dana atau uang memegang pelaksanaan penting sebagai perangsang dalam melakukan suatu pekerjaan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan dalam membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang.

Soedjadi (1989 : 155), mengatakan bahwasanya uang adalah faktor yang amat penting, bahkan menentukan di dalam setiap proses pencapaian tujuan, tentulah tidak dapat disangkal lagi. Untuk memenuhi tanggung jawab ini dan sekaligus sebagai alat untuk pengendaliannya, maka dibuatlah yang disebut anggaran atau budget sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan program pelaksanaannya. Bushard, dkk dalam Timpe (2002 :61) mengemukakan bahwa uang merupakan salah satu alat motivasi terkuat, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan persepsi nilai setiap pegawai. Uang menduduki posisi yang sangat penting

dalam implementasi suatu program. Selain uang, sarana dan Prasarana kerja merupakan faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi setiap organisasi mencapai kinerja yang tinggi.

Dalam implemetasi program, meskipun telah tersedia sumber berupa prosedur, metode kerja, dan sumber daya manusia, namun bila tidak atau kurang ketersediaan sarana dan prasarana kerja secara memadai baik jumlah maupun kualitas, tujuan yang ingin dicapai secara optimal dan maksimal sulit diperoleh. Keberadaan sarana dan prasarana kerja penting dan akan turut menentukan kelancaran kesuksesan pelaksanaan suatu program. Joko Widodo (2005 : 168), menegaskan bahwa. Selain dukungan anggaran yang cukup birokrasi akan bisa mencapai tataran kinerja optimal dan (maksimal) jika didukung pula sarana dan prasarana cukup memadai (kuantitas), sarana dan prasarana juga secara kualitas harus sesuai dengan kebutuhan. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Makmur (2007 : 76-77), bahkan secara tegas mengatakan. Walaupun secara teoritis SDM memegang peranan kunci dalam meningkatkan efektivitas organisasi, hanya dengan pendidikan SDM belum tentu dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik tanpa dilengkapi dengan fasilitas kerja dan peralatan kerja lainnya yang mendukung. Oleh karena itu, ketiadaan atau kekurangan sarana dan prasarana kerja bagi suatu organisasi menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sarana dan prasarana kerja dapat mencakup perabot kantor (office furniter) dan peralatan kerja (facilities).

3). Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Menurut Winter dalam Peters B. Guy ad Jon Pierre (2003 : 207) bahwa salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan adalah perilaku hubungan antar organisasi yakni menyangkut koordinasi dan hubungan kerjasama antar berbagai organisasi maupun antara organisasi dan individu dalam implementasi kebijakan. Hal ini dipertegas oleh Cheema dan Rondinelli dalam Dwiyanto (2009 ; 163), bahwa kerjasama inter organisasi menunjuk implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh interaksi dan koordinasi dari banyak jenis dan level yang berbeda dari organisasi pemerintah. Kerjasama yang baik antar unit-unit pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan tergantung pada :

- a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program, yaitu menunjuk adanya tujuan program yang jelas dan perintah ditangkap dengan benar oleh agen-agen pelaksana sehingga pelaksanaan aktivitas ditujukan untuk menunjang berkembangnya program.
- b. Pembagian fungsi secara tepat pada agen-agen pelaksana didasarkan pada kapasitas dan sumberdaya.
- c. Standarisasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan implementasi program sehingga dapat meminimalisir konflik interpretasi yang membuat program atau kebijakan sulit untuk dikoordinasi.
- d. Konsistensi dan kualitas komunikasi antar unit-unit pemerintah yang bertujuan menjadikan unit-unit pemerintah mampu

memahami aturan dan tugas untuk melengkapi aktivitas dalam pencapaian tujuan program.

- e. Efektifitas jaringan yang ditunjukkan pada unit-unit desentralisasi administrasi untuk memastikan adanya interaksi antar unit-unit organisasi pelaksana dan aktivitas organisasi.

4). Karakteristik agen pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah pelaksana (implementors). Menurut Merille S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi suatu program pemerintah dipengaruhi oleh pelaksana program yakni menyangkut kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 45), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan tergantung dari karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yang merupakan fungsi dari kemampuan pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Lanjutnya, kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. Menurut H.A. Moenir dalam Pasolong (1995 :116)

bahwa. Istilah kapabilitas atau capability diartikan sebagai kemampuan berasal dari kata dasar dari mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas /pekerjaan sehingga menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah yang baku dan umum digunakan ialah "skill" yang sering diterjemahkan menjadi "kecakapan". Dalam pada itu, menurut Ndraha (1987:113) : Kemampuan untuk melaksanakan tugas adalah kemampuan untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan atau hasil yang hendak dicapai. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 170) implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Mifta Thoha (1988 : 316) mengatakan bahwa, Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman. Menurut Katz & Rosenweigh dalam Pasolong (1980 :10), kemampuan adalah mengarahkan, menyediakan dan menyatukan berbagai tindakan yang secara teknis dibutuhkan guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan (To mobilize, allocate and combine the action that one technically needed to achieve development objectives). Selanjutnya keduanya mengatakan bahwa kemampuan tergantung pada ketrampilan dan pengetahuan (ability depends upon both skill and knowledge). Dua unsur tersebut merupakan determinan

dari kemampuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat menunjang peningkatan kecakapan melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan kemampuan sumber daya aparatur yang meningkat, pelaksanaan tugas dan fungsi akan dapat sukses dan berhasil.

Pendidikan akan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat (efektif dan efisien). Selain pendidikan diperlukan juga ketrampilan, itu semua diperoleh melalui latihan. Ketrampilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas latihan atau training yang telah dialaminya.

Demikian juga pengalaman merupakan potensi yang besar bagi seorang pegawai untuk melaksanakan tugas pekerjaannya secara produktif, efisien dan efektif, karena itu seseorang tidaklah cukup berlatar belakang pendidikan saja atau ketrampilan yang dimilikinya melainkan juga bekal pengalaman yang dimilikinya turut menentukan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Diakui Siagian (1992 : 60), bahwa pengalaman merupakan keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami.

Blanchard dan Hersey dalam Pasolong (1995 :5), menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga bidang kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial, dan kemampuan konseptual. Kemampuan teknis (technical skill), yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan training. Kemampuan sosial (social/human skill), yaitu kemampuan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain. Kemampuan konseptual (conceptual skill), yaitu kemampuan memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi organisasi secara menyeluruh.

5). Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Disposisi adalah suatu pendapat seseorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dan aturan tertentu. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementators) untuk melaksanakan kebijakan. Kemudian ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan (Implementators) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu

melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Hal ini juga dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 125) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan tergantung dari karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yang merupakan fungsi dari kemampuan pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Lanjutnya, kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan.

Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2008 : 98) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja atau dampak suatu program adalah kapabilitas agen pelaksana, yakni sebagai berikut : Keterampilan teknis, manajerial, & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, & mengintegrasikan keputusan; Dukungan dan sumberdaya politik instansi; Sifat komunikasi internal; Hubungan Yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan Yang baik antara instansi dengan pihak di luar & NGO; Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; Komitmen petugas terhadap program dan kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Selanjutnya David L. Weimer dan Aidan R. Vinning (1999) dalam Subarsono (2008:103), mengemukakan bahwa salah satu keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh Kemampuan implementor kebijakan yakni menyangkut tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. hal ini dipertegas oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2008 : 105) bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

6). Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2008 :102), salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan adalah lingkungan. Hal ini dipertegas oleh Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2008 : 94) bahwa lingkungan implementasi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan yang mencakup : a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005 : 99) menegaskan bahwa Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu juga David L. Weimer dan Aidan R.Vinning (1999) dalam Subarsono (2008 :103) mengatakan bahwa lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

2. COVID-19

Covid-19/Virus Corona pertama kali muncul di kota Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat pembelajaran sepi . Syafridah dan Ralang Hartati, (2020-496).

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus

ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar ke berbagai provinsi. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1, 2020).

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis). Karena penularan Virus Corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status Pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona (Widiyani, 2020).

a. Peraturan Terkait Covid-19

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul dan dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.

Untuk mencegah wabah Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial. Adapun peraturan-peraturan yang dibentuk sebagaimana berikut:

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 53 menyatakan: Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pasal 54 menyatakan: sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada di luar wilayah. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina, dan jika ada sakit dilakukan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 60 menyatakan: Undang-undang Karantina Kesehatan harus diatur dengan peratur pemerintah, namun hingga saat ini ada peraturan yang mengatur sehingga karantina wilayah tidak dapat diterapkan.

2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Keuangan.

Dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi panjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

4) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Menyatakan: Bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Sedangkan di Bulir Ke 3, disebutkan bahwa: Masing-masing kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

- 6) Mkalumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Isi Maklumat Kapolri tersebut antara lain tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kumpulnya massa dalam jumlah banyak. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi dan himbauan pemerintah. Dalam keadaan mendesak dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah.

Tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak yerpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas untuk segera menghubungi kepolisian setempat.

- 7) Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 009/1279/BUP. Tentang, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penanganan Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya.
- 8) Surat Edaran Bupati Jayawijaya Nomor : 003/915/BUP. Tentang, Kesiapan Siagaan Pencegahan Penyebaran Corona Virus (Covid-19).

- 9) Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 420/1007/BUP. Tentang, Penyampaian Informasi Kegiatan Belajar Mengajar Terkait Dampak Penyebaran Covid-19.
- 10) Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemberitahuan Nomor : 400/1206/BUP. Tentang Pengguna Transportasi Udara
- 11) Intruksi Bupati Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya

B. Penelitian Terdahlu

Sebagai bahan pertimbangan, kajian dan analisis penulis dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya maka dalam penelitian ini dicantumkan hasil-hasil penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang implementasi kebijakan di beberapa Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia guna untuk perbandingan dengan penulisan karya ilmiah ini, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Matriks Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Rohim Yunus, Annissa Rezki	Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberlakuan Lock Down belum berjalan dengan optimal	Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7 (3), 227-238, Tahun 2020
2.	Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan Nurirfan	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah belum berjalan dengan optimal	SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.6 Tahun 2020
3.	Dalinama Telaumbanua	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah berjalan dengan optimal	e-Jurnal Katalogis, Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Vol. 3 No.11 Tahun 2015

C. Definisi Operasional

Dalam menganalisa implementasi kebijakan pemerintah daerah, penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh van Meter dan van Horn.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Teori atau model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 158) mengemukakan bahwa ada enam indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan proses implementasi kebijakan, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah kepada tujuan yang tepat dalam pencegahan penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Jayawijaya.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah tersedianya potensi fisik maupun non-fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi adalah sebuah bentuk koordinasi dalam dukungan dan kerjasama antar instansi

satu dengan yang lain untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi kebijakan.

5. Disposisi implementor

Disposisi implementor adalah suatu pendapat dari implementor dalam menyikapi proses Implementasi Kebijakan.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi adalah sifat opini publik, elite politik dan sumberdaya ekonomi yang memadai, sehingga mampu untuk mendukung proses implementasi kebijakan.

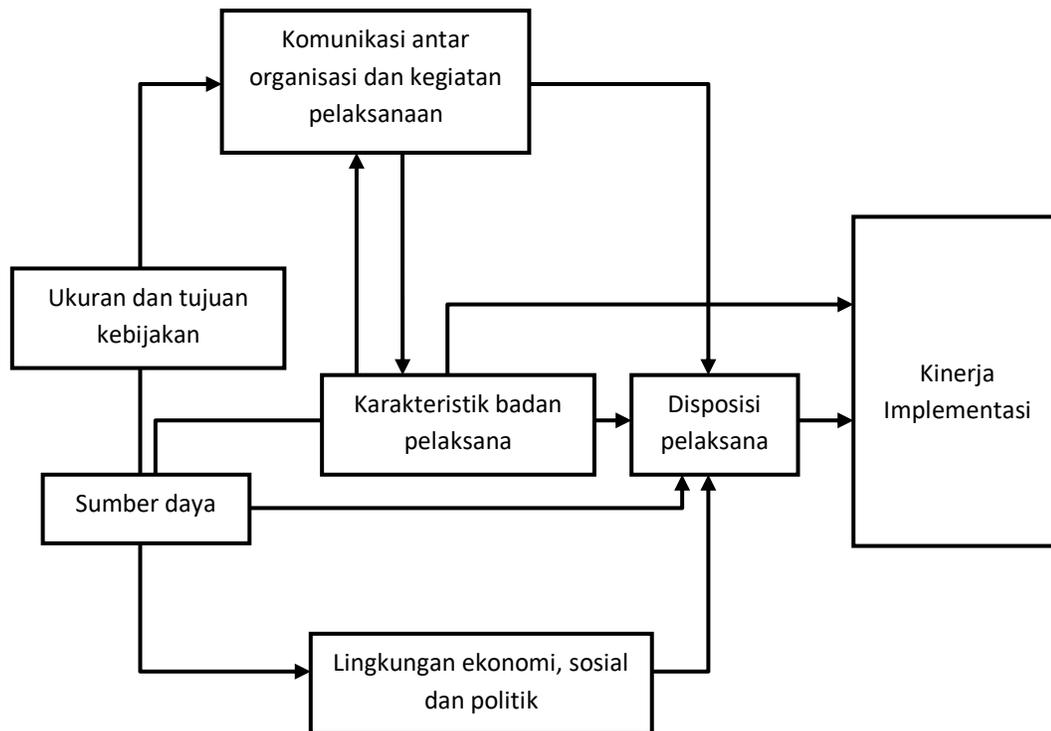
D. Alur Pikir Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam mengambil dan mengolah data dalam Penelitian tersebut, peneliti mencoba menggunakan alur pikir sebagai berikut:

Suatu keberhasilan dalam Implementasi kebijakan menurut Van Meter dapat dilihat dalam 6 (enam) indikator, yakni: Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana, hubungan antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi

implimentasi, kondisi lingkungan, maka dalam hal ini peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya. Dengan menggunakan 6 (enam) indikator tersebut (gambar 2.2).

Gambar 2.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)

Keterangan.

Pada kerangka konseptual penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana alur pembuatan instrumen penelitian dimana melakukan pengujian instrumen terlebih dahulu, kemudian melaksanakan penelitian dengan cara menentukan calon responden atau informan dengan memberikan kuesioner atau wawancara berdasarkan variabel implementasi kebijakan yaitu: Satandar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kareteristik agen pelaksana, disposisi implementasi, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dikelola dan dinalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan serta dilakukan pembuatan laporan penelitian.

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk memperoleh data penelitian dan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bupati Wamena Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah selama ± 2 (dua) bulan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendaoatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi.

Menurut Farida (2014:96) penetilian kualitatif memusatkan kepada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata –kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yng menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai bentuk aslinya pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

C. Sampel Sumber Data

Menurut **Sugiyono (2006:41)**, Sampel adalah bagian kecil dari jumlah yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili secara representative. Konsep sampel yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sampel yang diambil dari yang benar-benar representative (mewakili), agar apa yang dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk representative. Dalam penelitian ini, penentuan sumber data yang digunakan yaitu dengan mengambil teknik *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*.

Purposive sampling adalah (sambil bertujuan) yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, model pengambilan sampel dengan cara demikian disebut sebagai sampel bertujuan. Dalam hal ini ada kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Teknik *purposive* ini dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Oleh sebab itu pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman peneliti pada peta sumber data yang tersedia, dalam berbagai peran dan posisinya. Mengingat setiap posisi memiliki potensi untuk memberikan informasi dan memperoleh data yang berbeda. **Farida (2014:102)**

Menurut **Farida (2014:103)** *Snowball Sampling* digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi warga masyarakat di lapangan. Untuk itu peneliti memilih siapapun yang dijumpai. Kemungkinannya, peneliti hanya memperoleh data yang sangat terbatas. Karena itu, peneliti dapat bertanya pada informan tersebut, yang mungkin mengetahui siapa yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari petunjuk

informan pertama itu, peneliti dapat menemukan informan kedua dan seterusnya. Peneliti berjalan tanpa rencana, namun semakin lama semakin dapat mendekati informan yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja semacam itu diibaratkan seperti halnya bola salju, yang diawali dengan sangat kecil, mengelinding semakin jauh di lereng bukit dan menjadi semakin padat dan besar.

Adapun yang akan dijadikan sebagai sampel sumber data dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap representative, sebagai berikut:

1. Serketaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
2. 2 (dua) Pasien Covid-19 Jayawijaya yang pernah di Karantinakan
3. 2 (dua) Tokoh Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya

D. Instrumen Penelitian

Selain itu peneliti sendiri juga, diperlukan mempunyai alat bantu untuk mendapat data-data yang akurat dan sistematis serta dapat memudahkan dalam penyusunan data yaitu:

- 1) Panduan pertanyaan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan sebagai sumber data. Pertanyaan-pertanyaan dibuat berdasarkan variabel dan indikator yang dipakai berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.
- 2) Menyiapkan alat tulis, untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan yang di wawancarai.
- 3) Menyiapkan kamera untuk mengambil gambar pada saat interview dengan informan yang di anggap tahu masalah.
- 4) Menyiapkan kamera untuk merekam video pada saat wawancara dengan informan-informan yang peneliti anggap tahu masalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penelitian, mendapatkan data dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peninjauan secara cermat mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi secara langsung dengan cara bercakap-cakap dan bertatap muka terhadap subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

d. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literature, diklat-diklat, bahkan kuliah, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang

memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan sebelumnya, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), kemudian dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Seperti dinyatakan oleh **Miles dan Huberman (1984)** dalam **Sugiyono (2016:243)** bahwa : *“The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”*. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Berdasarkan teori diatas didapatkan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (**Sugiyono, 2016:244**).

1. Reduksi Data

Menurut **Sugiyono (2016:338)** Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola yang tepat dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh kemudian direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat standar elektronik seperti komputer mini, dengan memberi aspek-aspek tertentu.

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian. Sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah. Menurut **Miles and Huberman** dalam **Sugiyono (2016:341)** mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah dengan teks naratif.

Dengan *display* data maka akan mempermudah untuk melakukan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi,

merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data selain dengan teks naratif juga dengan gambar bahkan grafik maupun *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Menurut **Miles and Huberman** dalam **Sugiyono (2016:337)** mengemukakan bahwa dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a) Keadaan Kabupaten Jayawijaya

Sejarah Kabupaten Jayawijaya sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan Gereja di wilayah ini, karena Daerah ini adalah daerah terisolasi dari dunia luar, tetapi pada tahun 1950 – an Misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan Penginjilan di daerah ini.

Lembah Baliem ditemukan secara tidak sengaja, ketika Richard Archbold, Ketua Tim Ekspedisi yang di Sponsori oleh American Museum of Natural History melihat adanya Lembah hijau las dari kaca jendela pesawat pada tanggal 23 juni 1938. Penglihatan tidak sengaja ini adalah awal dari terbukanya isolasi lembah baliem dari dunia luar.

Tim ekspedisi yang sama dibawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken mendarat di Danau Habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah lembah baliem melalui lembah ibele dan mereka mendirikan Basecamp di lembah baliem.

Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah Messionaris dari Amerika serikat, termaksud di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiabah di lembah baliem. Tim missionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di sungai baliem, tepatnya di desa minimo dengan tugas utama memperkenalkan Agama Kristen ke oerang Dani di Lembah baliem. Stasiun missionaris pertama didirikan di Hitigima. Selama 7 (tujuh) Bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian missionaris menemukan sebuah Area yang ideal untuk dijadikan landasan pesawat udara. Area landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah Suku Mukoko dan di area inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang saat ini.

Pada tahun 1958 pemerintah Belanda mulai kekuasaannya di lembah Baliem, dengan mendirikan pos pemerintahannya di sekitar area landasan terbang, namun kehadirannya Belanda di lembah Baliem tidak lama, karena mulai proses panjang diawali dengan ditandatanganinya Dokumen Peperah pada tahun 1969, Irian Barat kembali ke pemerintah Republik Indonesia, sehingga pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua).

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Lembah Baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebutnya lembah Baliem atau biasa dikenal sebagai Wamena. Kabupaten Jayawijaya diresmikan pada tanggal 10 September 1996 dengan dasar hukum Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969.

Pemekaran Kabupaten pertama kali dilakukan pada tahun 2002 melalui Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan terbentuknya tiga Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo.

Pemekaran Kabupaten kedua kali pada tahun 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Pemekaran 4 (empat) Kabupaten baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 4 Januari 2008. Keempat Kabupaten baru yang dimekarkan tersebut yaitu :

1. Kabupaten Mamberamo Tengah dengan ibukota Kobakma, berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2008;
2. Kabupaten Yalimo dengan ibukota Elelim, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2008;
3. Kabupaten Lany Jaya dengan ibukota Tiom, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2008;
4. Kabupaten Nduga dengan ibukota Kenyam, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2008.

b) Letak Wilayah

Letak Geografis Kabupaten Jayawijaya di antara 138.30° - 139.40° BT dan 3.45° - 4.20° LS dengan ketinggian 1.650 di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan ibukota Wamena memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengan dan Yalimo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lany Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah.

c) Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.496 Km atau 12,76 persen dari total luas Provinsi Papua yaitu 322,476 Km, dengan jarak terjauh dalam jarak dari timur ke barat kurang lebih 104 Km dan jarak terdekat dalam jarak datar utara ke selatan kurang lebih 56 Km. Secara administratif Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) Distrik, 4 (empat) Kelurahan, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung. Distrik dengan Kampung terbanyak adalah Pelebaga (13 Kampung), sedangkan Distrik dengan Kampung paling sedikit adalah Wame dan Popugoba (masing-masing 4 Kampung). Distrik dengan wilayah terluas adalah Distrik Siepkosi (384,41 Km), Distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Wouma (48,75 Km).

2. Keadaan Informan

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, peneliti menggunakan 5 (lima) orang yang menjadi Informan dari latar belakang

berbeda dan di anggap representatif. Adapun keadaan informan dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel dan deskripsi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	Frekuensi	%
1	Laki – Laki	5	100 %
2	Perempuan	-	-
Jumlah		5	100 %

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh suatu gambaran bahwa keadaan informan laki-laki sebanyak 5 orang atau 100% dan 0 orang atau 0 % adalah perempuan.

Tabel 4.2
Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan

NO	Status/Jabatan	Frekuensi	%
1	Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya	1	20 %
2	Ketua Ikatan Keluarga Minang di Kabupaten Jayawijaya	1	20 %
3	Ketua Ikatan Keluarga Maluku Tengah di Kabupaten Jayawijaya	1	20 %
4	Masyarakat (Pasien Karantina) Kabupaten Jayawijaya	2	40 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4. Diatas tentang keadaan informan berdasarkan status atau jabatan dapat dijelaskan bahwa untuk informan pejabat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan presentase 20%, Ketua IKM (Ikatan Keluarga Minang) dengan presentase 20%, Ketua IKEMAL (Ikatan Keluarga Maluku Tengah) dengan presentase 20%, Pasien Karantina dengan presentase 40%

Tabel 4.3
Keadaan Informan Berdasarkan Usia

NO	Tingkat Umur	Frekuensi	%
1	20 – 35 Tahun	2	40%
2	36 – 45 Tahun	-	0%
3	46 – 55 Tahun	3	60%
Jumlah		5	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas tentang keadaan informan berdasarkan usia bahwa tingkat umur 20 – 35 Tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 40%, kemudian tingkat umur 36 – 45 Tahun berjumlah 0 dengan presentase 0%, dan tingkat umur 46 – 55 Tahun dengan presentase 60%.

Tabel 4.4
Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1	Magister (S2)	2	40%
2	Strata 1 (S1)	1	20%
3	SMA/SLTA	2	40%
Jumlah		5	100

Berdasarkan tabel 4.4 di atas tentang keadaan informan berdasarkan tingkat pendidikan bahwa informan dengan tingkat pendidikan Magister (S2) berjumlah 2 orang dengan presentase 40%, kemudian dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 1 orang dengan presentase 20%, dan tingkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 2 orang dengan presentase 40%.

3. Analisis Data dan Penyajian Data

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Di Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan 6 (enam) indikator yakni: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi Implementor, Lingkungan Sosial politik ekonomi.

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya

a) **Standar dan Sasaran Kebijakan**

1. “Apa saja standar penerapan kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?” berikut adalah hasil wawancara dari informan penelitian ;

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ya kalau terkait dengan standar, acuan kita itu kan pada ketentuan yang lebih tinggi ada Perpres, Pemendagri, peraturan ketua gugus. Jadi itu yang kita repitasi untuk kita terapkan di Daerah. Secara implementatif memang kita sesuaikan dengan Daerah, karena tidak semua kebijakan di sana itu bisa kita terapkan, tergantung kasus dan situasi masyarakat kita.



(Gambar 2.3 Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya)

2. “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19” ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ketika Covid ini menyebar sampai ke wamena maka hal – hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membentuk gugus, dengan adanya pembentukan gugus tugas maka promosi kesehatan itu dilakukan secara masif, ketika memang gugus tugas itu sudah berjalan maka segala penanganan dalam kendali gugus tugas, ya memang disana sini ada masalah saja tetapi Alhamdulillah bisa di selesaikan.

3. “Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja yang menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan tersebut?” berikut adalah hasil wawancara dari informan penelitian ;

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ya tentunya kita semua, karena bagaimanapun sebagai apapun kebijakan itu yang kita buat ketika masyarakat itu tidak mempunyai kepedulian untuk melaksanakan ya tidak ada artinya, sehingga masyarakat itu penyadaran diri dan itu yang kita harapkan sehingga lebih banyak untuk patuh terhadap kebijakan itu, karena kebijakan ini kan untuk mengatur masyarakat biar baik, tidak ada yang mengatur masyarakat yang tidak baik.

4. “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan

penyebaran wabah Covid-19?” berikut adalah hasil wawancara dari informan penelitian ;

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Tentunya pada tahap awal memang secara kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan adanya covid, melakukan pembatasan sosial, jadi pembatasan sosial terbatas mulai dari perhentian penerbangan, terus wajib pakai masker, terus melakukan pengaturan terhadap jam usaha, terus menutup sementara kegiatan – kegiatan yang memang secara pelaksanaan itu menimbulkan kerumunan seperti peribadatan baik itu muslim, non muslim. Itu secara implementatif pada awal – awalnya memang dilakukan. Hanya memang seiring dengan berjalannya waktu, dengan tingkat penyebaran yang bisa dikendalikan sehingga masalah – masalah yang seperti itu mulai dilonggarkan sedikit demi sedikit.

b) Sumber Daya

1. Bagaimana tingkat kesiapan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan kebijakan?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ya meskipun terbatas tetapi kami cukup memadai karena kita melakukan penarikan pada petugas – petugas paskes, puskesmas – puskesmas untuk memantu pada tingkatan kabupaten sehingga bisa membantu, jadi sebelumnya mereka melakukan pelayanan di pos-pos maka kita tarik untuk membantu penanganan covid di kabupaten.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Pada saat Covid itu tinggi terus terang memang kita pertama pada tingkatan rumah sakit, kita melakukan penambahan ruangan isolasi dan ruangan-ruangan baru memang kita fungsikan menjadi instalasi covid, terus yang diluar untuk orang-orang yang reaktif juga kita melakukan penetapan beberapa hotel dan beberapa penginapan untuk menjadi bagian dari pengendalian masyarakat yang reaktif, ada 4 hotel yang kita sewa untuk membantu proses ini dengan 1 penginapan.

c) Hubungan Antar Organisasi

1. Apakah ada keterlibatan instansi – instansi lain dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan penyebaran wabah covid 19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Semua komponen terlibat. Yang pertama ini kan virus ini bukan hanya pengobatannya tetapi promosinya, pengendaliannya, jadi semua orang terlibat termasuk tentara, polisi, semuanya terlibat karna apa, kalau tanpa keterlibatan itu maka ya akan sulit kita kendalikan

2. siapa saja yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pencegahan penyebaran virus ini ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Virus ini kan tugas bersama, seharusnya semua komponen terlibat. Yang pertama ini kan virus ini bukan hanya pengobatannya tetapi promosinya, pengendaliannya, jadi semua orang terlibat termasuk tentara, polisi, semuanya terlibat karna apa, kalau tanpa keterlibatan itu maka ya akan sulit kita kendalikan, kita juga minta peran-peran masing-masing termasuk pada teman-teman kerukunan, teman-teman pada jamaah masjid, gereja, itu kita minta keterlibatannya.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak terkait kinerja Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah covid 19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Jumat, 11 September 2020 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Kinerja pemerintah daerah saat ini dengan membentuk gugus tugas dan menjalankan promosi – promosi kesehatan secara masif dan mengacu pada kebijakan – kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan dan mengontrol kebijakan tersebut. Meskipun saat ini banyak kesulitan yang dialami akan tetapi masih bisa dikendalikan.

2. Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu dapatkan dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Yang sangat berat itu kan melakukan penyadaraan masyarakat, itu yang sangat berat karena ini kan sesuatu yang baru dan kita juga tidak tahu penyakit ini kan tidak kelihatan, itu menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu kan yang sangat berat sekali. Bahkan masyarakat yang reaktif-reaktif juga untuk kita karantina itu perlu sumber daya untuk kita lakukan, karena kalau tidak lari mereka. Bagian-bagian itu yang jadi masalah kita.

e) Disposisi Implementasi

1. Apa saja faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Fakto yang menjadi penghambat itu kurangnya tenaga medis dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu kan yang sangat berat sekali.

2. Bagaimana dampak yang diterima/dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kebijakan – kebijakan ini ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ya kalau masyarakat kan sebenarnya dengan adanya covid ini kan yang pastinya dampak ekonomi, tetapi ketika kebijakan kebijakan

itu kita terapkan yang jelas kan bisa dikendalikan penyakit itu. Jadi penyakitnya bisa dikendalikan sehingga relaksasi itu sudah kita lakukan secara bertahap.

f) Kondisi Lingkungan, Ekonomi & Politik

1. Apakah kebijaksanaan – kebijakan ini berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

pastinya dampak ekonomi, tetapi ketika kebijakan kebijakan itu kita terapkan yang jelas kan bisa dikendalikan penyakit itu. Jadi penyakitnya bisa dikendalikan sehingga relaksasi itu sudah kita lakukan secara bertahap.

2. Bagaimana peran masyarakat/ tokoh – tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

Ya perannya sangat tinggi, karena bagaimanapun sebegus apapun kebijakan itu yang kita buat ketika masyarakat itu tidak mempunyai kepedulian untuk melaksanakan ya tidak ada artinya, sehingga masyarakat itu penyadaran diri dan itu yang kita harapkan sehingga lebih banyak untuk patuh terhadap kebijakan itu, karena kebijakan ini kan untuk mengatur masyarakat biar baik, tidak ada yang mengatur masyarakat yang tidak baik.

3. Bagaimana planing kedepan dari pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan upaya dalam pencegahan penyebaran virus ini pak ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan - I** dengan Bapak Drs. Tinggal Wusono., M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 6 September 2021 di ruangan beliau, menyampaikan bahwa:

covid ini justru sekarang itu kan semakin masif begitu diluar peningkatannya semakin tinggi,sebenarnya kami di pemerintah daerah juga itu ingin menyadarkan masyarakat bahwa protokol kesehatan itu sangat perlu. Masyarakat itu tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti itu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain- lain, karen kan masyarakat sekarang itu sudah menganggap sesuatu hal yang biasa padahal kondisinya tidak seperti itu. Dari data yang ada kan sekarang itu justru peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan fase pertama covid itu ada untuk daerah-daerah tertentu.

- b. Tokoh – tokoh Masyarakat

a) **Standar dan Sasaran Kebijakan**

1. Bagaimana pendapat bapak terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan covid di Kabupaten Jayawijaya ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Jadi apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, saya selaku Kepala Suku Maluku Tengah merasa sudah sangat baik dan tepat sasaran.



(Gambar 2.4 Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Ikatan Keluarga Maluku Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Kami ketua – ketua paguyuban mendukung semua yang dilakukan pemerintah, demi kebaikan masyarakat, mendukung.



(Gambar 2.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ketua IKM “Ikatan Keluarga Minang”)

2. Apakah Tanggapan Bapak mengenai prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Terkait dengan prosedur, Pemerintah sudah melakukan banyak sosialisasi bahkan kepada masyarakat sampai ke desa terkait dengan penanganan covid, sosialisasi terkait bagaimana menjaga kebersihan, menjaga hubungan sosial dan sebagainya, semua sudah terkandung dalam protokol covid itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau saya melihat dari kaca mata saya sendiri, menurut saya sudah berjalan dengan baik.

3. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Selaku masyarakat saya merasa bahwa tingkat keberhasilannya cukup tinggi, sehingga saya merasa bahwa dengan langkah yang diambil oleh pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sangat tepat dan terbukti dengan data yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau itu saya tidak bisa menjawab ya, kalau kita lihat di dalam kegiatan sehari – hari, sebenarnya pemerintah sudah cukup membantu dalam menangani korona di wamena ini. Cukup bawasannyta sudah mencapai 90% sudah membantu pemerintah, tidak ada masalah, mendukung mereka.

4. Apa dampak kebijakan Pemerintah Daerah tentang pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Pertama dampak dari kebijakan yang pemerintah lakukan adalah tentu masyarakat harus hidup sehat itu harus sudah di mulai, paling tidak mereka sudah mulai menggunakan masker, sudah mulai rajin mencuci tangan di sekolah-sekolah, kantor-kantor dan tempat pelayanan umum protokol kesehatan itu sudah diberlakukan, nah keberhasilan yang ke dua itu atau dampak yang kedua adalah grafik dari kasus itu semakin hari semakin menurun dan sampai dengan saat ini saya katakan sangat berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Dampaknya juga terhadap ekonomi, karena ada penutupan bandara. Terhadap kegiatan – kegiatan ekonomi di Jayawijaya, itu dampaknya tapi tidak terlalu nampak, karena masalahnya hanya pada pemberlakuan jam kerja bagi pengusaha pengusaha.

b) Sumber Daya

1. Menurut Bapak, Bagaimana kesiapan Sumber Daya dari Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kepala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Angrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

tentu untuk kesiapan sumber daya manusianya memang pemerintah sempat mengalami kendala karena pertama kekurangan tenaga medis itu sudah pasti, tetapi dengan kekurangan yang ada saya rasa pemerintah telah melakukan banyak hal dan bisa mengantisipasi keadaan itu sehingga sampai hari ini semua berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Yaa menurut saya kesiapannya sudah mulai kelihatan karna kita lihat pemerintah sangat respon terhadap masalah ini

2. Apakah ada bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pencegahan penyebaran Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Angrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Ada bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga bantuan dalam bentuk bahan pangan, ya tentu dengan memperhentikan atau mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Setau saya itu tidak, kalau mungkin di tokoh masyarakat lain mungkin ada tapi di masyarakat saya orang padang ya untuk bantuan korona itu mungkin berupa bantuan sembako, kemungkinan ada, tapi bukan bantuan berupa uang tidak ada kelihatannya.

c) Hubungan Antar Organisasi

1. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Saya lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka sosialisasi sudah banyak, kami selaku tokoh masyarakat sering di undang juga untuk mendapatkan sosialisasi dari pemerintah dan itu sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Terkait dengan tindakan sosialisasi ini sering diadakan, ada pertemuan – pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

2. Apakah ada hubungan kerja sama antara Pemerintah dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam pencegahan penyebaran wabah covid 19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Kerja sama dalam artian tertulis memang tidak, tapi himbauan-himbauan pemerintah melalui tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat sampaikan kepada masyarakatnya itu sering dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Ada himbauan – himbauan dan rapat – rapat yang diadakan oleh pemerintah daerah, kita selaku tokoh – tokoh masyarakatpun hadir dalam rapat tersebut

d) Karakteristik Agen Pelaksana

1. Bagaimana Pendapat Bapak terkait Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kepala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Sangat baik, kalau menurut pendapat saya, kinerja Pemerintah Daerah sangat baik dan sangat memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Terkait kinerja Pemerintah masih belum bisa ditentukan karena ada masalah – masalah dalam pembangunan fasilitas perkantoran

e) Disposisi Implementasi

1. Bagaimana pendapat Bapak dalam proses tugas dan tanggung jawab dalam Pencegaha Penyebaran Wabah Covid-19, Apakah Pemerintah Daerah telah bekerja dengan maksimal ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Iya tentu, covid ini bukan barang main-main jadi pemerintah juga bekerja main-main, tapi karena ini pandemi dan seluruh dunia mengalaminya maka pemerintah dengan serius melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Yaa pemerintah harus bekerja dengan maksimal, kalau sejauh ini masih belum bisa ditentukan karena covid ini masih menyebar.

f) Kondisi Lingkungan, Ekonomi & Politik

1. Apakah selama masa pandemi Covid – 19 ada dukungan – dukungan dari Tokoh-tokoh Masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Tentu ada, dalam bentuk sumbangan-sumbangan, dalam bentuk kepedulian yang lain itu tentu diberikan oleh masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau dukungan dari kami kepada masyarakat kami hanya menghimbau saja, supaya dalam kegiatan bersifat keramaian atau di pasar supaya pakai masker dan jaga jarak, itu saja, itu himbauan.

2. Sejauh ini, bagaimana peran Tim Covid – 19 dalam pencegahan penyebaran wabah Covid – 19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Ya tentu tim covid itu bekerja sesuai standar operasional prosedur yang di tentukan sehingga kalau sampai saat ini berjalan dengan baik tentu tim covid itu juga bekerja dengan baik sehingga hasilnya juga kita rasakan baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Yaa Kinerja Tim Covid – 19 sudah bagus, meskipun tidak kelihatan posko posko Covid tapi menurut saya sudah peran Tim Covid – 19 sudah cukup baik.

3. Apakah kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kepala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Sangat tentu, covid ini mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, nah oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian pemerintah dengan semakin baiknya situasi yang ada sekarang tentu pemerintah sudah mulai membuka akses dan semua sentra ekonomi juga sudah mulai berjalan dengan baik, diharapkan dengan demikian juga tentu ekonomi masyarakat juga akan kembali pulih dan perekonomiannya juga mulai meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Yaa tentu berdampak pada ekonomi masyarakat, dengan mulai berlakunya jam operasional bagi para pengusaha dan pembatasan akses penerbangan sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat

4. Bagaimana planing ke depan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kabupaten jayawijaya ini pak, terkait covid ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – II** Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, di Guest House D'Anggrek, Jln Ambon No. 1, menyampaikan bahwa :

Ya tentu walaupun situasi ini sudah normal kembali tentu tokoh masyarakat akan terus menghimbau masyarakatnya dengan rutin agar terus menjaga pola hidup yang bersih kemudian cuci tangan, masker dan sebagainya itu tentu harus, sebab covid ini tidak akan hilang segampang yang kita pikirkan, kalau kita lalai nanti akan bermasalah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – III** Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Koramil Wamena Jln Trikora, beliau menyampaikan bahwa :

Saya menghimbau semoga corona ini cepat berlalu dan ekonomi kita juga pulih kembali, pemerintah disisi lain bisa mendukung dalam keadaan mungkin kalo bisa tempat-tempat usaha dibuka kembali, yang sudah di bangun segera di buka, supaya ekonomi di jayawijaya cepat pulih.

c. Pasien Karantina

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Apa Alasan Sehingga Anda Dikarantinakan ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Mungkin alasan untuk karantina, awal pertama itu mungkin faktor kecapean bukan karena ada gejala lain. Mungkin pas bertepatan dengan hari ulang tahun BPJS, jadi disitu ada dibuka salah satu pertandingan futsal jadi disitu saya juga jarang bermain futsal jadi pasti ada rasa kecapean itu pasti ada, jadi besoknya di rapid tes dan reaktif untuk dikarantina. Memang bukan ada faktor gejala lain tapi hanya karena kecapean saja.



(Gambar 2.6 Dokumentasi Wawancara dengan Pasien Karantina 1)

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten

Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Angrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Saya terkonfirmasi Reaktif Covid-19 pada saat melakukan swab antigen di puskesmas wamena kota.



(Gambar 2.7 Dokumentasi Wawancara dengan Pasien Karantina 2)

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid – 19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau dari pemerintah sudah baik tapi, kalau untuk masalah keluar masuk ini kan mungkin harus di batasi juga, karena penyakit bukan dari kita tapi ya tergantung masalah kebersihan itu pasti di utamakan apalagi kayak di bandara ya otomatis ya

minimal penerbangan ya batasnya tiga kali saja, karena yang bawah virus bukan dari wamena tetapi dari luar wamena.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Menurut saya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda kabupaten jayawijaya sudah cukup bagus tetapi ada beberapa hal yang harus ditinjau kembali, contohnya pembatasan penerbangan masuk ke wamena, kalau memang mau melakukan pembatasan seharusnya akses darat juga dibatasi.

3. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Ya kalau menurut saya, keberhasilan implementasi kebijakan sudah mulai terlihat karena sudah ada vaksin di Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten

Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Tingkat keberhasilannya saya rasa sudah cukup baik.

4. Apa dampak yang Bapak rasakan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau dampak seperti bantuan - bantuan dari pemerintah, minimal harus dirasakan dan diterima oleh seluruh masyarakat yang terinfeksi Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Dampak baiknya saya merasa lebih aman karna pemerintah lebih serius dalam menghadapi virus ini, dan dampak buruknya saya merasa kesulitan dalam hal pengurusan administrasi di kantor manapun karena semuanya dibatasi.

b) Sumber Daya

1. Menurut Bapak bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran wabah Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Ya kalau dalam kinerja ya baik-baik saja, tapi kembalikan ke masyarakatnya saja, apakah dia mau mendengar atau tidak, karena penyakit bukan dari kita tapi ya jaga selalu kebersihan saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Kinerja dari pemda jayawijaya sudah cukup baik, hanya saja pengontrolan dari pemda dalam pengawasan aktivitas masyarakat dan pembatasan jam kerja masih belum kelihatan, akan tetapi pemerintah sudah berusaha dalam penanganan virus ini.

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Tenaga Medis selama masa Karantina?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau kualitas pelayanan saya ambil dari pengalaman saya sejak saya di karantina memang bagus, rutin di periksa terus disana juga terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau kualitas pelayanan yang saya alami selama masa karantina di wamena hotel selama 15 hari masa karantina, saya sangat puas dngn pelayanan tenaga medis, pelayanan yang diberikan sangat baik,petugas sopan dan tanggap dalam melakukan pelayanan.

3. Menurut Bapak bagaimana fasilitas yang tersedia selama masa karantina, apakah sudah memenuhi harapan ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau masalah fasilitas ya difasilitasi, dari makanan dan obat – obatan pokoknya dari tempat tidur ya semua di jamin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau menurut saya fasilitas ya sudah baik, obat obatan diberi dengan teratur,kesehatan kita dikontrol selalu, tempat tinggal dan sebagainya itu dijamin selama masa karantina.

4. Apakah ada bantuan finansial setelah masa karantina ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten

Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau setelah di karantina kan otomatis kita karantina mandiri lagi, itu tidak ada kata batuan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau bantuan finansial yaa hanya berupa makanan, obat obatan, dan fasilitas kesehatan saja selama masa karantina. Kalau bantuan uang tidak ada.

c) **Hubungann Antar Organisasi**

1. Apakah ada sosialisasi kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pasien selama masa karantina Covid – 19 ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Hanya saja di kasitau pakai masker, jaga jarak, ya itu yang di utamakan saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Selama masa karantina, sosialisasi kesehatan ya sering dilakukan oleh tenaga medis, pengontrolan kesehatan juga sering dilakukan sehingga kita puas selama masa karantina

d) Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah ada kesulitan pasien alami selama masa karantina wabah Covid-19 berlangsung ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Sebenarnya disana tidak ada kesulitan sih cuman, pasti 14 hari di sana itu rasa bosan. Rasa kesulitan itu tidak ada sama sekali malahan rasa terjamin ya ada, tapi rasa kesulitan itu hanya rasa bosan saja, karena selama 14 hari di kamar pasti biar siapa pun tetap dia bosan juga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Sebenarnya disana kesulitan yang dialami itu hanyalah keterbatasan untuk bertemu keluarga atau saudara – saudara yang ingin menjenguk, kemudian kesulitan yang berikut saya tidak bisa bekerja sehingga pemasukan untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa terpenuhi.

e) Disposisi Implementor

1. Bagaimana pendapat Bapak dalam proses tugas dan tanggung jawab dalam masa karantina wabah Covid-19, apakah Pemerintah Daerah sudah bekerja dengan kejujuran ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau masalah kejujuran, kalau dari tim covid ini kalau menurut saya baik - baik saja, misalnya untuk kita okelah sudah jujur, misalnya dari obat dia sudah bantu untuk melihat kita yang selama di karantina, terus kita tidak tahu yang dari alur belakangnya seperti bagaimana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Angrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Masalah kejujuran ini saya pribadi tidak mengetahui itu, akan tetapi dari kinerja tenaga medis saja kita bisa menilai banyak pelayanan yang diberikan selama masa karantina sudah baik.

f) Kondisi Lingkungan, Politik & Ekonomi

1. Apakah ada dukungan dari lingkungan sosial selama masa karantina ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten

Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Kalau dukungan disitu iya, mereka tidak tahu, saya menghindar dari mereka karena saya takutnya di usianya mereka pasti juga ya salah satu mereka pikiran atau bagaimana, rasa saya ingin dijauhi lah, saya takutnya seperti begitu. Makanya saya ttidak pernah mau bicara selama saya di karantina, saya tidak mau jadi beban pikiran bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Yaa ada dukungan moril dari keluarga, sahabat, dan juga dari kepala dinas saya dan ketua kerukunan keluarga maluku utara.

2. Apakah menurut Bapak kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – IV** Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Jln Hom-Hom, beliau menyampaikan bahwa :

Ya kalau dalam masalah kebijakan ya pasti, terpengaruh, sangat terpengaruh apalagi hanya masalah di luar banyak, banyak yang masih cari-cari kerja terus dibatasi itu paling banyak. Apalagi sistem ekonomi itu masalah paling besar, banyak yang mati kelaparan hanya karna covid-19, mungkin itu saja dari saya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Informan – V** Saudara Jutisma Buchary Akbar Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di

Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Rabu, 2 September 2021, di Cafe Anggrek, Jln Ambon, beliau menyampaikan bahwa :

Iya sangat berpengaruh bagi perekonomian, akan tetapi kita ambil maksud positif dari pemda jayawijaya.

B. Pembahasan Penelitian

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pencegahan dan Penyebaran Wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu alat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tentang pencegahan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Intruksi pada tanggal 23 Juni 2021 yaitu Intruksi Bupati Jayawijaya Nomor 02 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun kendala dalam implementasi kebijakan yakni berkaitan dengan SDM yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya sehingga dalam proses pencegahan penyebaran wabah Covid 19 ini cukup kewelahan, Sosialisasi tentang pemahaman Covid 19 kepada masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan bahayanya virus ini dan keterbatasan jam kerja bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak puas dikarenakan kebijakan – kebijakan ini.

Selanjutnya, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya diuraikan berdasarkan indikator penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagaimana berikut ini:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Implementasi Instruksi Bupati Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya, bahwa dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai berikut : UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan umum, peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019.

Untuk itu, penegakan pada Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Seperti yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 kasus Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya yaitu sejumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) kasus aktif.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Komponen – komponen masyarakat seperti kepala – kepala suku atau paguyuban – paguyuban serta peran Tenaga Medis yang kurang sehingga membuat proses berjalannya penanganan Covid 19 ini sempat kewalahan akan tetapi masih bisa diatasi. Olehnya itu, demi memaksimalkan implementasi kebijakan maka Pemerintah Daerah harus berupaya maksimal untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang siap dan tanggap dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang akan datang, karena SDM merupakan salah satu syarat penting – penunjang bagi terlaksananya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dengan baik.

2. Sarana Dan Prasarana Ataupun Peralatan Pendukung

Sumber daya dalam konteks sarana dan prasarana ataupun peralatan pendukung dalam mengupayakan pencegahan dan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya. Menjalankan implementasi kebijakan dalam hal ini adalah Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya, untuk menjalankan kebijakan ini Pemerintah Daerah harus memfasilitasi semua kebutuhan – kebutuhan dalam hal ini kebutuhan Tenaga Medis yang mempunyai peran penting dalam menghadapi Covid 19, seperti APD (alat perlindungan diri), Obat – obatan, tempat karantina yang layak, serta fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas Sarana dan Prasarana ataupun peralatan yang mendukung sudah harus disiapkan demi menunjangnya proses implementasi kebijakan agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan lapangan terutama dalam pencegahan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya sehingga berjalan dengan efektif.

c. Hubungan antar Organisasi

Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tentunya melibatkan organisasi lain dalam hal ini Kepolisian, TNI, Tokoh – tokoh Masyarakat atau Paguyuban – paguyuban dan Masyarakat yang menjadi sasaran dalam proses pencegahan dan penyebaran Covid 19. Dengan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses pencegahan dan penyebaran Covid 19 ataupun kegiatan di lapangan sangat membantu dan akan terlaksana dengan baik.

Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dibutuhkan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak, sehingga dalam proses Implementasi Kebijakan juga tidak mesti dibebankan pada suatu Instansi, tetapi juga harus melibatkan semua pihak yang lainnya demi tercapainya tujuan dari Instruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Jayawijaya.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, Norma -Norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:45) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan tergantung dari karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yang merupakan fungsi dari kemampuan pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Dalam konteks Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya dengan meninjau Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara

Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Struktur organisasi Pemerintah Daerah kabupaten Jayawijaya sudah sangat efektif dalam proses implementasi kebijakan, yang mana kita tahu bahwa peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam proses pencegahan penyebaran wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari peran Tokoh Masyarakat atau Paguyuban – paguyuban, TNI Polri serta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

e. Disposisi Implementor

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah pelaksana (*implementors*). Menurut Merille S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi suatu program pemerintah dipengaruhi oleh pelaksana program yakni menyangkut kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di daerah dalam hal ini Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kapabilitas dan Kompetensi yang dimiliki oleh setiap agen pelaksana kegiatan adalah faktor yang sangat penting demi mewujudkan tujuan dan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Akan tetapi hal ini masih belum tercapai penuh dikarenakan SDM yang belum memadai.

f. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dari aspek kebudayaan masyarakat tidak menjadi penghalang dalam Proses Implementasi Kebijakan dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya. Perlu kita sadari bahwa pencegahan penyebaran Covid 19 ini sebenarnya tidak mudah, butuh kesiapan yang sangat matang

untuk menghadapi virus ini dan semua komponen itu harus terlibat untuk memutuskan rantai Covid 19. Masyarakat Kabupaten Jayawijaya seharusnya sadar akan hal ini dan mau menaati peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketika Kebijakan – kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sebaik – baiknya dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menyikapi Covid 19 dan kebijakan yang berlaku ini sangat mendukung keberhasilan proses implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan dalam menyikapi keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan tentu dengan adanya dukungan – dukungan dari masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat atau Paguyuban – paguyuban sehingga sangat membantu dalam kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Aspek ekonomi dari hasil wawancara bahwa perekonomian di Kabupaten Jayawijaya masih belum stabil dikarenakan banyak faktor yang dapat memperlambat perekonomian di Kabupaten Jayawijaya. Dalam penelitian ini yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Covid di Kabupaten Jayawijaya, adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya terkait penanganan Covid 19 yaitu Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tentunya kita bisa melihat bahwa tertulis dengan jelas di dalam Instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya bahwa akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dari hal tersebut kita telah menerima risiko yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat di daerah ini. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat sedang mencari nafkah demi melangsungkan kehidupan. Akan tetapi kita juga harus melihat nilai positif dari hal tersebut, karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah ini tentu mempunyai maksud baik untuk keberhasilan proses Implementasi Kebijakan dalam pencegahan dan penyebaran Wabah Covid 19 di Kabupaten Jayawijaya.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini dikarenakan waktu yang sangat singkat, permasalahan permasalahan yang dihadapi selama meneliti dalam hal ini banyak informan yang tidak mau diwawancarai dikarenakan kesibukan – kesibukan dan kekhawatiran untuk bertemu dan melakukan kontak dengan orang lain. Dari permasalahan – permasalahan tersebut peneliti sempat menunda penulisan skripsi ini sehingga peneliti lambat dalam menyusun tugas akhir ini. maka peneliti masih merasakan kekhawatiran untuk bertemu dan melakukan kontak dengan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan berdasarkan enam indikator yakni:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sudah sesuai dengan tujuan yaitu sasaran implementasi kebijakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.
2. Sumber daya dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga medis yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya masih kurang sehingga Pemda masih kewalahan dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian sarana, prasarana, dan yang mencangkup kebutuhan lapangan, sudah cukup membantu dalam pencegahan penyebaran Wabah Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya.
3. Hubungan Antar Organisasi dalam dalam suatu proses implementasi kebijakan sangat berpengaruh, untuk itu dalam proses implementasi kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya menjalankan hubungan dengan TNI, Polri, Tokoh-tokoh Masyarakat, Paguyuban-paguyuban, dan tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
4. Karakteristik Agen Pelaksana dalam setiap Struktur organisasi yang dimiliki Pemda Kabupaten Jayawiajaya sudah sangat efektif untuk proses implementasi kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Karakteristik dan kapabilitas yang dijalani oleh setiap agen

pelaksana dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya sudah berjalan secara struktural dan sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki.

5. Disposisi Implementor sangat berpengaruh dalam sebuah Pemerintahan Daerah, untuk menyikapi dan mengambil keputusan tentang suatu permasalahan yang terjadi di daerah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2021 “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah langkah serius yang di ambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga kasus Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya sudah semakin berkurang.
6. Dari factor lingkungan masih belum ada kesadaran dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya untuk menjalankan protokol – protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam konteks politik kita dapat menilai bahwa dalam proses implementasi kebijakan terdapat banyak dukungan – dukungan moral yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Paguyuban-paguyuban untuk membantu jalannya implementasi kebijakan. Kemudian terkait faktor ekonomi, masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang menjadi dampak dari kebijakan ini tentu sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah memperhambat perekonomian masyarakat. Akan tetapi hal ini dapat diterjemahkan secara rasional oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai pengaruh penting demi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini kepada Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya diwaktu yang akan datang sebagaimana beriku ini:

1. Meningkatkan kualitas dan menambah Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengadaan fasilitas sarana prasarana dan kebutuhan kesehatan untuk mendukung jalannya Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya.
2. Mensosialisasikan Setiap Kebijakan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Instruksi Bupati dan Surat edaran lainnya dalam bentuk lisan maupun tulisan agar tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jayawijaya akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menindak ataupun mengontrol berjalannya kebijakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku dalam setiap elemen-elemen yang mendukung jalannya kebijakan – kebijakan tersebut.
4. Dalam proses merancang suatu kebijakan, Pemerintah Daerah harus lihai dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dan tidak merugikan masyarakat khususnya Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku - Buku

(2020). *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7, Nomor 1.

Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*,
Rineka Cipta, Jakarta

A.G, S. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Bawanda, W. C. (n.d.). Peranan Kepala Kampung Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Di Kampung Apenas Distrik Welesi
Kabupaten Jayawijaya .

Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV.
Alfabeta.

Dunn, W. (1999). *Analisis Kebijakan*. Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk.
Jakarta.

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy
Analysis* . Yogyakarta: Gava Media.

Makmur. (2007). *Patalogi Serta Terapi Dalam Ilmu Administrasi dan
Organisasi*. Bandung: Refika aditama.

Miles, Mattew dan Huberman, A. Michael (1992). *Analisa Data
Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*.
Jakarta: UI Press.

Moneir. (1995). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:
Bumi Aksara.

- Ndraha, T. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Nugrahani, D. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: UNAIR.
- Pierre, P. B. (2003). *Handbook of Public Administration*. Sage Publications.
- Siagian, S. (1992). *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoah, M. (1988). *Kepemimpinan dalam Manajemen-Suatu Pendekatan Perilaku*. Rajawali.
- Widodo, J. (2005). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Citra, Malang.

b. Dokumen – Dokumen

- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang Dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Sosial

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona22

Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 009/1279/BUP. Tentang, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penanganan Covid – 19 di Kabupaten Jayawijaya.

Surat Edaran Bupati Jayawijaya Nomor : 003/915/BUP. Tentang, Kesiapan Siagaan Pencegahan Penyebaran Corona Virus (Covid-19).

Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 420/1007/BUP. Tentang, Penyampaian Informasi Kegiatan Belajar Mengajar Terkait Dampak Penyebaran Covid-19.

Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemberitahuan Nomor : 400/1206/BUP. Tentang Pengguna Transportasi Udara

Intruksi Bupati Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya

(Daftar Pertanyaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah
Kabupaten Jayawijaya)

Data Responden

Hari dan Tanggal Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Informan :

Umur :

NIP :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

Instansi :

Daftar Pertanyaan :

Variabel : Implementasi

Indikator : Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Apa saja standar penerapan kebijakan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?
2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan tersebut?

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?

Indikator : Sumber Daya

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat kesiapan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan kebijakan?
5. Apakah sumber daya yang ada telah cukup memahami dan terampil dalam mengimplementasikan kebijakan?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?

Indikator : Hubungan Antar Organisasi

7. Apakah pernah dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?
8. Apakah ada keterlibatan dengan instansi – instansi lain dalam mengimplementasikan kebijakan terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?
9. Siapa saja yang terlibat dalam Mengimplementasikan Kebijakan terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?

Indikator : Karakteristik Agen Pelaksana

10. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terkait kinerja Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?
11. Apakah kinerja agen pelaksana sudah bekerja sesuai SOP yang dipedomani?
12. Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu dapatkan dalam Pencegahan Wabah Covid-19?

Indikator : Disposisi Implementasi

13. Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan?
14. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana dampak yang diterima/dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kebijakan – kebijakan ini?

Indikator : Kondisi Lingkungan

15. Menurut Bapak/Ibu, Apakah kebijakan – kebijakan ini berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat?
16. Sejauh Mana Peran Tim Covid-19 dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?
17. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat, tokoh – tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya (Daftar Pertanyaan bagi Tokoh-tokoh Masyarakat)

Data Responden

Hari dan Tanggal Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Informan :

Umur :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

Daftar Pertanyaan :

Variabel : Implementasi

Indikator : Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?
2. Apakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?
4. Apa dampak kebijakan Pemerintah Daerah tentang pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?

Indikator : Sumber Daya

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesiapan Sumber Daya dari Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?
6. Apakah ada bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya?

Indikator : Hubungan Antar Organisasi

7. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Tokoh-tokoh Masyarakat terkait pencegahan penyebaran wabah Covid-19?
8. Apakah ada hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Tokoh – tokoh masyarakat dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Indikator : Karakteristik Agen Pelaksana

9. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terkait kinerja Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19?

Indikator : Disposisi Implementor

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam proses tugas dan tanggung jawab dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19, apakah Pemerintah Daerah telah bekerja dengan maksimal?

Indikator : Kondisi Lingkungan, Politik dan Ekonomi

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19 ada dukungan-dukungan dari Tokoh-tokoh Masyarakat?

2. Sejauh ini, bagaimana peran Tim Covid-19 dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?
3. Apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya (Daftar Pertanyaan bagi Pasien Karantina Kabupaten Jayawijaya)

Data Responden

Hari dan Tanggal Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Informan :

Umur :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Daftar Pertanyaan :

Variabel : Implementasi

Indikator : Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Apa alasan sehingga Anda dikarantinakan ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ?
4. Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19?

Indikator : Sumber Daya

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya?
6. Bagaimana kualitas pelayanan tenaga medis selama masa karantina?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas yang tersedia selama masa karantina sudah memenuhi harapan?
8. Apakah ada bantuan finansial setelah masa karantina berakhir?

Indikator : Hubungan Antar Organisasi

9. Apakah ada sosialisasi kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pasien selama masa karantina Covid-19?

Indikator : Karakteristik Agen Pelaksana

10. Apakah ada kesulitan – kesulitan yang pasien alami selama masa karantina Wabah Covid-19 berlangsung?

Indikator : Disposisi Implementor

11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam proses tugas dan tanggung jawab dalam masa karantina Wabah Covid-19, apakah Pemerintah Daerah telah bekerja dengan maksimal?

Indikator : Kondisi Lingkungan, Politik dan Ekonomi

12. Apakah ada dukungan dari lingkungan sosial selama masa karantina?
13. Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan Pemerintah Daerah dalam pecegahan penyebaran wabah Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi?

Lampiran III: Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bapak Tinggal Wusono, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, bertempat di gedung Otonom Sekretariat Kabupaten Jayawijaya.



Wawancara Bapak H. Sudirman S.Sos Selaku Kepala Suku Minang (IKM) di Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Koramil Wamena Kabupaten Jayawijaya.



Wawancara Bapak Taufik Petrus Latuihamallo, Selaku Kapala Suku Maluku Tengah (IKEMAL) di Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Guest House D'Anggrek Wamena



Wawancara Bapak Rezka Febrian Syahrin Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Kantin Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.



No. Lab : 505


PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAMENA KOTA
Jl. Ahmad Yani, No. Telp (0969) 31811, Distrik Wamena 99511


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ANTIGEN COVID -19

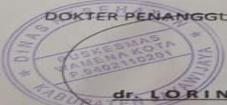
NAMA PASIEN	: JUTISMA BUCHARY AKBAR JUMATI	
UMUR / JK	: 23 TAHUN / LAKI - LAKI	
NIK	: 9102012402980004	
ALAMAT	: JL. BAYANGKARA	
DOKTER PENGIRIM	: dr. LORINA	
TANGGAL PEMERIKSAAN	: 10 AGUSTUS 2021	

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN
Antigen SARS COV-2 (RDT)	POSITIF	NEGATIF

Hasil pemeriksaan berlaku 3 (tiga) hari, sejak surat keterangan hasil rapid diterbitkan. Dan tidak bisa digunakan untuk PENTINGAN PERJALANAN.

Pernyataan:
 Hasil Negatif dari Antigen Covid -19 tidak serta merta menyatakan yang bersangkutan Tidak Terinfeksi dari Virus SARS COV-2
 Jika hasil pemeriksaan ini adalah yang pertama, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang pd 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 Jika Hasil pemeriksaan kedua adalah Negatif, maka saat ini belum terdeteksi antibody terhadap SARS COV-2
 Jika Hasil pemeriksaan Positif, lanjutkan dengan konfirmasi Tes Swab PCR.

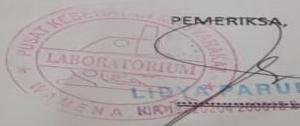
DOKTER PENANGGUNGJAWAB



dr. LORINA
NIP. 19830415 201104 2 001



PEMERIKSA



LABORATORIUM
WAMENA KOTA

Wawancara Saudara Jutisma B.A Jumati Selaku Pasien Karantina Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Cafe D'Angrek Wamena.



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENGHENTIAN PENERBANGAN UNTUK PESAWAT PENUMPANG DAN PESAWAT PERINTIS DENGAN TUJUAN BANDAR UDARA WAMENA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA

Bahwa dengan melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 22 Juli Tahun 2021 Kasus CORONA-19 di Kabupaten Jayawijaya yaitu sejumlah 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) Kasus aktif.

Bahwa Kabupaten Jayawijaya sudah memenuhi 3 (tiga) Kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Point Ke 13 (Tiga Belas) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 huruf b, huruf d dan huruf e.

Intruksi Bupati Jayawijaya Nomor 02 2021 tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Penghentian Penerbangan untuk Pesawat Penumpang dan Pesawat Perintis dengan tujuan Bandar Udara Wamena dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jayawijaya.

TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN JAYAWIJAYA

UPDATE

27 Agustus 2021
Pukul 15.00 WIT

▲ 11
▼ 11

RAPID / SWAB

Karantina Menunggu Hasil SWAB

Hari ini	Keluar	Jumlah	Kumulatif
11	11	0	2291

COVID 19

Terkonfirmasi Positif

(+) COVID 19	SEMBUH	MENINGGAL	KUMULATIF
168	1632	27	1824

▲ 1
▼ 15 ▲ 1

DISTRIK Terdampak Covid 19

- # DISTRIK WOUMA
- # DISTRIK HUBIRIAK
- # DISTRIK WAMENA
- Kel. Sinakma
- Kel. Wamena Kota
- Jl. Thamrin
- Jl. Bhayangkara
- Jl. Trikora
- Jl. Hom - Hom
- Jl. Gatot Subroto
- Jl. Diponegoro
- Jl. SD Percobaan

#DiRumahSaja
#JagaJarak
#TetapPakaiMasker
#SelaluCuciTangan

CALL. CENTER

082 198 317 091
081 339 518 158

Sumber: Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID -19. Kabupaten JAYAWIJAYA

Data COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya

BIODATA PENULIS



Reza Refaldi Kastela Beragama Kristen Protestan, dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1999 di Wamena, anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Johanis Markus Kastela dan ibu Irene Merce Silooy., SH, pada tahun 2010 tamat Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Amahusu Ambon, pada tahun 2013 tamat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 11 Ambon, pada tahun 2016 tamat Sekolah Menengah Atas YPPK Santho Thomas Wamena dan diterima menjadi Mahasiswa pada Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena pada tahun akademik 2016/2017, selama dalam proses perkuliahan penulis mengikuti kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal, pada kegiatan internal kampus penulis menjabat sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tahun 2016 - 2018 dan menjadi Sekretaris Jendral Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tahun 2018 – 2020.